

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh perubahan sosial akibat proses nasionalisasi, modernisasi dan globalisasi mengharuskan setiap orang menganalisis segala sesuatu secara rasional dan mendasar, supaya setiap masalah yang timbul di masyarakat dapat dipecahkan dengan baik. Demikian juga di dalam upaya untuk mencapai suatu sistem pendidikan yang sempurna termasuk Pendidikan IPS (*social studies*). Para pakar, pelaksana, dan penyelenggaranya dituntut dapat dan harus memperhitungkan kenyataan-kenyataan kemanusiaan dan sosial, serta mencoba menggali dan menciptakan prasyarat-prasyarat yang sedapat mungkin jelas dan efisien serta berdaya jangkau ke masa depan.

Membahas pendidikan IPS (*social studies*) akan selalu menarik perhatian, karena beberapa alasan: Alasan *pertama*, social studies mempunyai tujuan yang mulia dan luas. Dikatakan tujuannya mulia, karena menurut Jarolimek dan Parker (1993:3) di dalam buku "*Social Studies In Elementary Education*", *social studies* ialah " ... ditujukan sebagai perekat bagi kehidupan komunitas masyarakat heterogen yang berbeda agama, etnis, asal-usul kebangsaan bahkan bagi masyarakat yang berbeda status sosial-ekonominya, juga ditujukan sebagai pembaharu pendidikan (sekolah) agar menjadi wahana untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat heterogen tersebut". Di mana sebelum itu pendidikan (sekolah) hanya merupakan tempat penyelesaian tugas tertentu.

Adapun dikatakan tujuannya luas, karena menurut Banks (1985:3), di dalam buku “*Teaching Strategies for the Social Studies*”, dinyatakan bahwa *social studies* itu sebagai bidang kurikulum atau program pendidikan di sekolah dasar dan di sekolah menengah. Sebagai program pendidikan di sekolah menengah (high school), *social studies* ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan nilai-nilai (values) agar siswa mampu berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat luas yang meliputi masyarakat lokal, nasional dan dunia. Sebagai program pendidikan di sekolah dasar *social studies* ditujukan untuk mengembangkan “*civic competencies and skills*” agar siswa mampu berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat demokrasi. Tujuan dari kedua program pendidikan tersebut selengkapnya dikemukakan Banks, sebagai berikut:

The social studies is that part of elementary and high school curriculum which has the primary responsibility for helping students develop the knowledge, skills, attitudes, and values needed to participate in the civic life of their local communities, the nation, and the world. While the other curriculum areas also help students to attain some of the skills needed to participate in a democratic society, the social studies is the only curriculum area which has the development of civic competencies and skills as its primary goal (Banks, 1985:3).

Alasan *kedua*, *social studies* sebagai program pendidikan bagi penulis merupakan bidang pelik dan rumit, karena merupakan bidang gabungan berbagai disiplin ilmu yang mempunyai banyak tujuan dan kegunaan, “*Social studies is characterized by multiple goals and purposes*” (Welton & Mallan, 1988:14). *Nastional Council for Social Studies* (NCSS) yang berpusat di Washington, D.C., Amerika Serikat. menyebut *Social Studies* sebagai

“*Synthetic Disciplines*”, yakni: “Pendidikan IPS adalah suatu *synthetic discipline* yang berusaha untuk mengorganisasikan dan mengembangkan substansi ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan” (Somantri, 2001:199). Adapun yang dimaksud *synthetic discipline* di sini, adalah hubungan inter-disipliner antara disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu-ilmu pendidikan untuk tujuan pendidikan (Somantri, 2001:111). *Synthetic disciplines* ilmu seperti itu oleh Mehlinger (1995) dikategorikan sebagai “*advance knowledge*”, yaitu kerjasama antar-disiplin untuk memecahkan masalah yang tidak mungkin dapat dipecahkan oleh mono-disiplin (Somantri, 2001:206).

Menurut analisis Hasan (2002:2-3), *social studies* (IPS) sebagai program pendidikan dikelompokkan ke dalam dua pengertian, yaitu sebagai “Pendidikan Ilmu Sosial” dan sebagai “Pendidikan Sosial”. Sebagai pendidikan ilmu sosial, IPS menitikberatkan tujuannya kepada kepentingan disiplin ilmu, serta ada upaya mengembangkan tujuannya kepada “*civic competence*”. IPS sebagai pendidikan sosial, menitikberatkan tujuannya kepada keterlibatan peserta didik pada hal-hal yang berkenaan dengan keterlibatannya dalam perbuatan sosial atau “*reflective thinking for social problem, democratic citizenship, and growth*”.

Lebih jelasnya mengenai kriteria dan tujuan *social studies* sebagai pendidikan ilmu sosial, tertera dalam definisi NCSS yang dikemukakan Schneider (1994) dalam buku “*Curriculum Standards for Social Studies: Expectation of Excellence*”, sebagai berikut:

Social studies is integration of social sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world (Schneider, 1994:3).

Adapun kriteria dan tujuan social studies sebagai pendidikan sosial tertera jelas dalam definisi yang dikemukakan Sunal dan Hass (1993:7-8) di dalam buku "*Social Studies and the Elementary Middle School Student*" sebagai berikut:

Social studies is an area of the curriculum deriving its goals from nature of citizenship in a democratic society with links to other societies. Drawing its content from the social sciences and other disciplines, it is also incorporates the personal and social experiences of students and their cultural heritage. It links factors outside the individual, such as a cultural heritage, with factor inside the individual, particularly the development and use reflective thinking, problem solving, and rasional decision-making skill, for the purpose of creating involvement in social action.

Alasan *ketiga*, terdapat aliran di lingkungan ilmuwan sosial sendiri yang menganggap pengertian *social studies* sebagai program pendidikan yang bergengsi dan terhormat hanyalah pengertian social studies sebagai pendidikan ilmu sosial. Adapun pengertian yang lainnya dianggap sebagai kelas bawah. Barr dan kawan-kawannya termasuk kepada aliran ini. Mereka menyimpulkan bahwa *social studies* yang bertradisi "*reflective inquiry*" adalah merupakan "*the bastard child of social studies*" atau sebagai anak haram yang lahir dari *social studies* (Hasan, 2002:1-2)

Alasan *keempat* adalah merupakan masalah di dalam social studies yang sangat menantang, dan karenanya alasan ini merupakan inti permasalahan yang akan dicarikan jawabannya di dalam tulisan ini, yani terbukti di dalam sejarah peradaban manusia bahwa *social studies* sebagai “pendidikan ilmu sosial” maupun sebagai “pendidikan sosial” tidak atau belum berhasil mengatasi problem-problem kemanusiaan. Sebagai pendidikan ilmu sosial ia tidak dapat membuktikan tujuannya seperti yang dikemukakan Banks, yakni mengembangkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agar manusia (siswa) mampu berpartisipasi di lingkungan sosial yang luas meliputi lingkungan lokal, nasional dan global. Sebagai pendidikan sosial, ia tidak mampu mengembangkan nilai dan keterampilan manusia (siswa) dapat berpartisipasi di lingkungan masyarakat demokratis, mampu berperan menyelesaikan problem-problem sosial dengan baik. Hal ini antara lain ditandai oleh “perilaku yang terjadi di dunia pilitik, sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan dalam kehidupan agama masa kini” (Hasan, 2002:8). Selain itu terdapat fakta-fakta atau sejarah di dalam kehidupan sosial-budaya atau di dalam peradaban manusia yang berlawanan dengan tujuan social studies. Contohnya seperti yang dicatat Somantri (2001:52-53) di dalam buku “*Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*”, bahwa di dalam peradaban manusia antara tahun 1496 SM sampai dengan tahun 1861 M, yaitu satu kurun waktu 3357 tahun, hanya tercatat 227 tahun masa damai dan 3130 tahun masa perang, atau untuk **satu tahun** damai ada **13 tahun perang**. Selama tahun 1945-1983 saja telah terjadi penggunaan kekuatan

militer oleh 66 negara merdeka dalam 105 kali peperangan yang menelan korban sekitar 16 juta jiwa.

Dari catatan Somantri di atas, terlihat dengan jelas bahwa jalannya peradaban manusia berlangsung tidak jauh berbeda antara waktu-waktu sebelum "*social studies*" ditemukan dengan waktu-waktu sesudahnya. Malah dilihat dari jumlah peristiwanya (peperangan) yang terjadi, tampak bahwa setelah *social studies* ditemukan Bangsa Amerika, "***As a subject, social studies is an American invention***", yang diciptakan lebih dari 70 tahun yang lalu, serta telah banyak diikuti oleh beberapa negara seperti Kanada, Australia dan bangsa-bangsa yang muncul di Afrika (Welton & Mallan, 1988:15). Akan tetapi *social studies* tersebut kenyataannya belum membawa *rahmat* (perdamaian) dan *berkah* (kemakmuran) bagi kehidupan manusia.

Dalam kurun waktu 38 tahun (1945-1983) situasi dunia tidak pernah damai. Keadaan ini menunjukkan bahwa setelah *social studies* ditemukan, ternyata peradaban manusia semakin buruk dan kacau. Jadi sekali lagi, jelas serta patut diakui bahwa *social studies*, hingga sekarang belum dapat mencapai tujuan sebagaimana yang dikehendaki atau yang dikemukakan para penggagasnya. Dengan kata lain, *social studies* gagal memecahkan problem-problem kemanusiaan. Oleh sebab itu, perlu dicari dan dijawab apa yang menjadi masalah utama di dalam *social studies*?

Memperhatikan jalannya peradaban sebagaimana dikemukakan di atas, dan memperhatikan perilaku sosial saat ini, yang ditandai antara lain oleh banyaknya pertentangan yang tidak konstruktif; kerusuhan massal, tawuran

pelajar, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya jumlah pengangguran, maraknya para koruptor, dan lain sebagainya., menurut tanggapan Hasan (2002:2) khususnya di Indonesia, adalah disebabkan *pendidikan IPS tidak mampu menerapkan filosofi pendidikan di dalam disains kurikulum*. Menurut analisis Somantri (2001:52-53), sebagai penyebab utama timbulnya peradaban sebagaimana dikemukakan di atas, adalah karena kelompok manusia yang merasa menjadi pemenang (Barat) dalam mengembangkan peradaban manusia memilih *intellectus quaerens fidem sebagai credo keilmuan*. Mereka berpedoman pada credo keilmuan (*scientific creed*) yang dipimpin oleh hanya intelek atau ratio saja, serta percaya bahwa dengan credo keilmuan tersebut mereka sanggup membuat kenyamanan dan kesenangan, sementara agama hanya '*private culture*' masing-masing individu, bahkan bagi mereka tidak yang beragama pun tidak menjadi masalah. Dalam hal ini, kehidupan emosional dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dijunjung tinggi oleh manusia diabaikan. Mereka hanya tunduk kepada otoritas ekonomi dan mekanisme demokrasi politik. Namun, karena otoritas ekonomi dan keserakahan materiil lebih dominan, maka dengan sendirinya melenyapkan sikap-sikap demokratis. Mereka (negara-negara maju) bisa berbuat apa saja atas kemampuan "syahadat" "*knowledge is power*" dan '*intellectus quaerens fidem*', terutama setelah Renaissance, syahadat tersebut telah membangunkan supremasi negara-negara Barat dalam kebudayaan materiil (Somantri, 2001:178).

Secara harfiah menurut pemikiran Barat "*intellectus quaerens fidem*" berarti akal mengatasi atau lebih utama daripada iman/agama, dan "*fides*

*quaerens intellectum*” berarti sebaliknya, yaitu iman/agama mengatasi akal. Filsafat Barat yang beranggapan iman/agama yang bersumber dari wahyu disebut juga tradisi **Semitisme**, sedang yang beranggapan akal sebagai sumber dari pikiran manusia dikenal dengan tradisi **Hellenisme**. Dikotomi ini di dalam peradaban Barat sangat sentral. Renaissance yang lahir pada abad ke-15 menandai terjadinya revolusi dari “*fides quaerens intellectum*” dengan besarnya kekuasaan gereja menjadi “*intellectus quaerens fidem*” ketika hasil olah pikir manusia menjadi sumber peradaban. Hal ini berlanjut dengan gerakan Humanisme di Perancis (abad ke-18) yang berpuncak pada Revolusi Industri (abad ke-19) yang kemudian melahirkan peradaban Barat sekarang (Somatri, 2002:91).

Menurut Toffler (1992), sejarah peradaban Barat yang telah mempengaruhi dunia hingga sekarang mencatat bahwa pilihan terhadap “*intellectus quaerens fidem*” telah melahirkan berbagai faham dalam filsafat ilmu dan telah pula membawa kemajuan yang pesat dalam kebudayaan materiil, seperti otoritas ekonomi, sains, dan seni untuk masyarakat Barat. Akan tetapi, dalam waktu yang bersamaan kemajuan kebudayaan materiil itu telah melahirkan pula naluri-naluri rendah dalam bentuk penjajahan kepada rakyat yang tinggal di belahan selatan dunia, dan peperangan yang mengakibatkan kemiskinan, keterbelakangan dalam hampir seluruh bidang kehidupan yang dampaknya masih akan dirasakan di daerah belahan selatan dunia pada abad mendatang (Somantri, 2001:92).



John Fien dan Rod Gerber (1988) memcatat dampak-dampak dari credo keilmuan "*intellectus quaerens fidem*" seperti itu, sebagai berikut:

- (1) attention and violence are on the increase in a world already dangerously overarmed and under-nourished;
- (2) 30 children are dying each minute for want of food and in expensive vainness;
- (3) at the same time, US\$ 1,5 million per minute are being spent on armaments;
- (4) 150 major wars have been fought in the last 40 years;
- (5) torture of people, animals and environment has reached epidemic proportions;
- (6) the male of the species, only half of population, does barely a third of the planet's work yet takes 90% of the income, direct and indirect violence against female of species is generally the norm;
- (7) in 40 years the stockpile nuclear weapons has grown to 50.000 (Somantri, 2001:53)

Dengan kata lain, dampak dari credo keilmuan yang mendewakan *supremacy of reason*, menurut John Fien dan Rod Gerber tersebut di atas: (1) telah menimbulkan atau memperluas berbagai ketegangan dan kekerasan yang akan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan makanan dan gizi di dunia; (2) telah tercatat 30 anak meninggal seketika karena lapar dan tak terobati; (3) diperkirakan dana yang diperlukan untuk membeli alat-alat perang mencapai US\$ 1,5 juta per menit; (4) dalam 40 tahun yang lalu telah terjadi 150 kali peperangan besar; (5) dan telah mengakibatkan, banyak penderitaan manusia, hewan dan rusaknya (berubah) berbagai lingkungan hidup; (6) 90 % makhluk hidup di planet bumi, secara langsung maupun tidak langsung akibat tindak kekerasan tersebut (peperangan) menjadi tidak berdaya; dan (7) dalam tempo 40 tahun persediaan senjata nuklir meningkat hingga mencapai 50.000.

Kredo keilmuan "*intellectus quaerent fidem*" dan "*knowledge as power*" yang nyata-nyata membawa dampak buruk kepada kehidupan manusia dan lingkungan sosialnya, oleh Brameld (1985) dalam bukunya "*Education as Latar Belakang Masalah*"



*Power*” dipandang sebagai kekuatan yang tidak bermoral. Karena itu penulis sebagai berikut:

Power as such is amoral. The crucial problem of our time is how to assure that both power and knowledge will be developed and applied neither for amorality nor amorality, but for utmost morality (Somantri, 2001:179).

Dengan demikian jelas, bahwa untuk menghadapi dan mengatasi problem-problem kemanusiaan sekarang, masalah utama yang harus dipecahkan terlebih dahulu di dalam *social studies* adalah tentang **filosofi social studies** atau **kredo keilmuannya**. Dengan kata lain, *social studies* harus memiliki kredo keilmuan sah serta universal untuk menjawab: *bagaimana? antara kekuasaan (power) dan pengetahuan (knowledge) dapat dibina dan diaplikasikan sehingga menjamin tidak ada seorang pun yang tidak bermoral, melainkan seluruhnya bermoral. Singkatnya, kekuasaan (power) dan pengetahuan (knowledge) itu dapat menjamin keselamatan hidup umat manusia dan lingkungannya.*

Sementara ini, memperhatikan sungguh-sungguh definisi-definisi *social studies* yang penulis jumpai di antaranya seperti definisi-definisi para ilmuwan social yang dikemukakan di lembaran terdahulu di dalam tulisan ini, tampak jelas bahwa di dalam definisi-definisi *social studies* dari para ahli tersebut, *tidak ada kredo keilmuan yang sah dan universal sebagai landasan filosofis dan sumber eksistensi dan kelestarian hidupnya*. Dengan demikian sebagai akar permasalahan di dalam *social studies* yang harus dipecahkan di dalam tulisan tidak lain adalah tentang kredo keilmuan (*scientific creed*), artinya, tulisan ini harus berusaha memberikan landasan filosofis *social studies* dengan kredo keilmuan yang *sah dan universal*. Walau pun terlihat ada usaha

ke arah itu, seperti usaha yang dilakukan NCSS, di dalam definisinya tertera agama (*religion*) dicantumkan sebagai salah satu sumber di dalam *social studies* (Schneider, 1994:3).

Namun, mencantumkan agama sebagai salah satu sumber di dalam *social studies*, jika dianalisis secara *religius-islami*, dalam pandangan penulis usaha tersebut sebagai tindakan keliru atau tidak tepat, karena agama (*Din/agama samawi*) menurut definisi yang dikehendaki Allah adalah merupakan ajaran Tuhan yang sah, komprehensif serta universal, yaitu sebagai integritas ajaran dari “*tauhid-uluhiyah*” dan “*tauhid-qawamah*”. *Tauhid-uluhiyah* adalah ajaran mengenai keyakinan atau I’tikad (*keimanan*) sebagai prinsip atau *ruh* tenaga pembangkit kehidupan sosial budaya yang utuh, jelas dan mutlak. Dengan prinsip ini umat manusia bertitik tolak mengarahkan pandangan dan membina kehidupan sosial budaya untuk mencapai kemuliaan hidup bersama yang diridhai Allah. *Tauhid-qawamah* adalah satu ajaran (al-kitab) sebagai petunjuk bagi pengurusan atas umat manusia dan semesta alam. Dengan petunjuk tauhid (al-kitab) ini manusia akan menemui jalan memahami diri dan sesamanya, seluk beluk keberadaan alam semesta, serta fungsi-fungsinya yang terkandung di dalamnya. Dan karenanya manusia akan dapat berperan menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yaitu sebagai pemakai, perekayasa dan pemelihara alam semesta dengan segala isinya sesuai nafas *tauhid-uluhiyah* (Quthb, 2001:22-23).

Kapasitas dan cakupan *tauhid-qawamah* tersebut meliputi seluruh bidang dan aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan Surat An-Nahl ayat 89 dalam

Kitab Al-Qur'an: "Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri". Dan, ayat 38 Surat Al-Anaam menegaskan: "Tiadalah Kami apakan sesuatu apapun di dalam Al-Kitab". Jadi logikanya, berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, arkheologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, sosiologi, ilmu sastra, atau humaniora, matematika dan ilmu-ilmu pengetahuan alam, adalah merupakan bagian-bagian dari agama (Din/ agama samawi), yaitu tergolong ke dalam "tauhid-qawamah".

Maka dari itu, agama dijadikan sebagai bagian dari sumber *social studies* sangat tidak tepat dan keliru; yang tepat adalah menjadikan agama sebagai keseluruhan sumber atau objek telaahan di dalam *social studies*. Namun, karena bagian-bagian dari agama telah terkreasikan dengan jelas ke dalam berbagai disiplin ilmu tersebut di atas, maka yang perlu diusulkan di dalam tulisan ini, adalah menjadikan keimanan (*tauhid-uluhiyyah*) sebagai bagian terpenting di dalam *social studies*. Dengan kata lain, *tauhid-uluhiyyah* tersebut harus ditetapkan sebagai nafas atau kredo keilmuan (*scientific creed*) di dalam Pendidikan IPS, sehingga tauhid tersebut merupakan himpunan terstruktur yang primer dari jenis entitas yang dipaki untuk memberikan penjelasan dalam *social studies*. Dengan asumsi: Pendidikan IPS sebagai "Pendidikan Ilmu Social" maupun sebagai "Pendidikan Social", jika berlandaskan kepada kredo keilmuan "Tauhid-Uluhiyyah", maka eksistensi Pendidikan IPS akan tumbuh dan berkualitas secara akademik atau "*academic excellence and cultivation of intellect*", serta akan menjadi ilmu pengetahuan yang fungsional (*functional*

*knowledge*), yakni dapat menguji masalah-masalah sosial yang nyata atau “*reflective thinking for social problem solving; democratic citizenship, and growth*”, maupun yang menjadi tuntutan manusia masa depan.

Mengingat permasalahannya sangat prinsip, karena menyangkut credo keilmuan yang ditetapkan ajaran Allah (al-Qur’an), maka untuk membuktikan asumsi tersebut di atas, perlu menjelaskan wilayah-wilayah filsafat ilmu di dalam al-Qur’an yang meliputi wilayah ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu. Untuk itu sesuai dengan latar belakang masah di dalam tulisan ini, maka akan dibahas dalam judul yang dirumuskan menjadi: “***Universalitas Konsep Kemanusiaan Dari Nilai-nilai Religius (Al-Qur’an) Dalam Akuntabilitas Pendidikan IPS***”.

Mungkin timbul suatu keraguan atau pertanyaan, bagaimana mungkin? nilai-nilai religiusitas tersebut dapat diterima secara logik untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan sebagaimana yang ditandakan Brameld di atas, karena kaum Muslim sendiri selaku pemeluknya, keadaan dan perilaku mereka saat ini tidak tampak lebih baik dari keadaan dan perilaku kaum hellenisme (Barat). Bahkan siapa pun dapat melihat dengan jelas bahwa secara material maupun intelektual kaum Muslim sekarang keadaannya tertinggal jauh oleh masyarakat Barat. Dengan kata yang lebih ektrim, kaum muslim pun yang selama ini tidak ragu-ragu gambar-gembor memiliki ajaran bermukjizat yang diwahyukan Allah, ternyata mereka sekarang tidak kelihatan mampu mengatasi problem-problem kemanusiaan. Semua yang mereka katakan tentang al-Qur’an

tidak ada di dalam kenyataan sekarang. Dus al-Qur'an pun sekarang tidak dapat mengatasi masalah-masalah kemanusiaan yang timbul atau sedang terjadi.

Tentu saja, penulis pun orang yang mengakui sebagai “pemeluk” al-Qur'an, tidak dapat membantah kenyataan kaum Muslimin seperti itu, namun tidak berarti harus setuju begitu saja jika dikatakan al-Qur'an tidak dapat dan/atau tidak akan bisa mengatasi problem-problem kemanusiaan. Karena terdapat bukti-bukti di dalam sejarah peradaban manusia bahwa al-Qur'an pernah berhasil dengan baik dan sempurna di dalam mengatasi problem-problem kemanusiaan. Selain itu, ditemukan beberapa penyebab mengapa al-Qur'an tidak lagi bisa mengatasi problem-problem kemanusiaan saat ini.

Max I Dimont (1993:149) dalam buku “*Jews, God, and History*” mencatat, bahwa bangsa Arab di abad VI sebelum kedatangan Rasulullah membawa al-Qur'an, mereka adalah kaum nomadik padang pasir, tetapi di abad VII setelah memperoleh petunjuk-petunjuk al-Qur'an dari Rasulullah mereka adalah penakluk-penakluk dalam gerap gemuruh, di abad VIII mereka menjadi tuan-tuan sebuah imperium yang membuat Mediterania menjadi danau Muhammad, dan di abad IX mereka adalah standard-pengemban sebuah peradaban yang mempesonakan, tokoh terkemuka dalam seni, arsitektur, dan sains. Sedangkan Eropa Barat tenggelam ke dalam rawa-rawa kegelapan yang ia (Eropa Barat) buat sendiri. Bukti sejarah tersebut diakui Maurice Bucaille seorang tabib ahli bedah berkebangsaan Perancis, ia (1979:173) di dalam “*La Bible Le Coran Et La Science*”, menuturkan bahwa Banyak hutang kami (orang-orang Barat) kepada pengetahuan Arab dalam matematika (kata al jabar adalah kata Arab),

astronomi, fisika dan optik, geologi, ilmu tumbuh-tumbuhan (botanik), ilmu kedokteran (Ibnu Sina) dan lain-lain. Untuk pertama kali Sains mempunyai sifat internasional dalam Universitas Islam pada abad pertengahan. Pada waktu itu manusia lebih mempunyai jiwa keagamaan daripada sekarang, akan tetapi dalam Dunia Islam hal tersebut tidak menghalangi seseorang untuk menjadi orang yang mukmin dan pandai sekaligus. Sains adalah saudara kembar daripada agama, dan akan tetap begitu.

Adapun di antara penyebab mengapa sekarang al-Qur'an tidak tampak lagi mampu mengatasi problem-problem kemanusiaan? Menurut Bucaille (1979:173-174), sesudah Renaissance, di negeri Barat, untuk bicara tentang Tuhan di kalangan ilmuyawan adalah janggal. Sikap semacam ini juga terdapat dalam otak-otak yang muda yang menerima pengetahuan dari universitas-universitas Barat, termasuk otak-otak muda Islam. Sehingga sering terjadi kekeliruan di dalam menginterpretasi ayat-ayat al-Qur'an. Selain itu, di dalam penerjemahan al-Qur'an sering hanya mengambil alih interpretasi para ahli tafsir di zaman dahulu, tanpa pendirian kritik. Ayat 38 Surat al-Furqon memberi jawaban atas masalah tersebut sebagai berikut:

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

Artinya; Berkatalah Rasul: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah memperlakukan al-Qur'an ini menjadi bola permainan semata-mata. (QS. 25:30).

Keluhan Rasulullah sebagaimana pada ayat tersebut benar-benar terjadi. Munawir Sjadzali (1990:34-110) di dalam buku "*Islam dan Tata Negara:*

*Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*”, mengemukakan bukti-bukti penyimpangan umat manusia atas ajaran al-Qur’an sejak sepeninggalan (wafat) Rasulullah SAW. Secara garis besar bentuk-bentuk penyimpangan itu antara lain ditandai dengan serentetan pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintahan yang syah. Dari sejak zaman Amirul Mu’minin Abu Bakar, telah timbul suatu pemberontakan yang dipimpin oleh Musallamah “al-kadzab”, yang cukup merisaukan umat. Musallamah tidak ragu-ragu mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Umar bin Khathab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, di saat masing-masing menjadi pemimpin di bunuh pemberontak.

Klimak dari serentetan pemberontakan itu ialah merusak prinsip-prinsip ajaran al-Qur’an yang telah ditegakan Rasulullah. Sebagai catatan saja, perang Shiffin I tahun 655 M adalah merupakan buah pemberontakan bersenjata yang dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan. Amru bin Ash sebagai panglima perang Muawiyah, memperlakukakan kemaluan manusia sebagai strategi dan taktik untuk memenangkan perang. Perang Shiffin II yang dimenangkan oleh Muawiyah dengan strategi tipu muslihat. Ayat 59 surat An Nissa sebagai prinsip di dalam pemerintahan Islam, tidak dihiraukan. Mereka – يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ – وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا – melawan dan menjatuhkan Ali bin Abi Thalib sebagai Khlaifah pilihan umat dengan cara-cara yang tidak terpuji.

Resminya, Alin bin Abi Thalib dikhianati dalam perundingan *Daumatul Jandal*. Di dalam perundingan itu, Abu Musa Al-As’ari selaku delegasi dari



pihak Ali bin Abi Thalib dengan Amru bin Ash selaku delegasi dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, bersepakat keduanya untuk memecat Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah bin Abi Sufyan dari kekhalifahan. Dengan sopan Amru bin Ash mempersilahkan Abu Musa Al-Aa'ari untuk terlebih dahulu memecat Ali bin Abi Thalib, maka setelah Ali bin Abi Thalib dipecat oleh Abu Musa Al-As'ary, berdirilah Amru bin Ash di atas mimbar, dan berkata: "Karena Ali sudah dipecat, maka khalifah satu-satunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan demikian berhasilah kelicikan dan tipu muslihat Amru bin Ash. Dari itu, tegaklah kerajaan dinasti Arab dari Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah, dan tidak lama dari itu, Alin bin Abi Thalib pun dibunuhnya.

Pemerintahan Bani Umayyah tersebut tegak sejak tahun 662 M. Di mana prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an menurut tradisi kerasulan Muhammad SAW diselewengkan oleh dinasti Muawiyah yang didukung oleh Majelis Ulama Murji'ah. Misalnya, sistem dan prinsip pemerintahan musyawarah diganti dengan sistem dan prinsip monarki atau kerajaan dengan kepala negara turun temurun. Rumusan-rumusan tentang dasar-dasar kehidupan kaum muslimin, seperti rumusan "Iman" yang oleh Rasulullah SAW ditetapkan sebagai – *الإيمانُ* *عَقْدٌ بِالْقَلْبِ وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ* (ابن ماجه). *الإيمانُ معرفة القلب وإقرارُ اللسانِ وعملُ* *بالأركانِ (الطبراني).* – pandangan dan sikap hidup, maka oleh Muawiyah lewat Majelis Ulama Murji'ah-nya diputar belikan menjadi *عَقْدُ الإِيمَانِ بِالْقَلْبِ* tok (fakot), yakni hanya sebagai percaya saja.

Pemutarbalikan terhadap prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an menurut tradisi Rasulullah SAW oleh Muawiyah beserta Ulama-nya itu, bertujuan untuk

mempertahankan kekuasaannya atas desakan kaum Hawarij sebagai kelompok oposisi yang menentang kenyataan Muawiyah yang hidup megah di sebuah istana kerajaan di Damaskus, sedang kaum Muslim hidup hina dina dan miskin papa. Dengan kata lain, Muawiyah tidak lagi sesuai antara omongan dengan perilaku hidupnya, yang berarti ia sudah jauh menyimpang dari ajaran al-Qur'an yang ditegakan Rasulullah SAW.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa penyebaran ajaran Islam ke berbagai pelosok yang telah dilakukannya seperti ke Timur mulai dari India, Tiongkok hingga pada akhirnya sampai juga ke Indonesia; dan ke Barat mulai dari bangsa-bangsa Afrika Utara sampai kepada bangsa Eropa Selatan, dan ke sebelah utara sampai ke Rusia selatan, semua itu belum tentu bermotifkan nilai-nilai Iman. Bahkan kalau ditilik dari keangkuhan dan kelicikannya, bisa diyakini bahwa yang mendorong penyebaran Islam itu, hanyalah bermotifkan imperialis, yakni untuk memperoleh keuntungan material yang luar biasa. Dan karenanya pula, bisa jadi ajaran Islam yang sampai ke berbagai pelosok negara-negara di dunia seperti yang sampai ke Indonesia adalah sebagai ajaran Islam hasil pemutar balikan mereka, atau subjektivitas yang bertujuan untuk mempertahankan kepentingan sendiri; dengan kata lain bukan ajaran Islam yang objektif menurut tradisi Rasulullah SAW.

Jadi ajaran Islam yang benar itu adalah al-Qur'an yang objektif menurut penjelasan atau praktek Rasulullah SAW yang keseluruhannya ditujukan untuk merahmati semesta alam, dan membina akhlak mulia. (Djahiri, 13 Sept, 2002). Adapun sebagai prinsip-prinsipnya tertuang di dalam rumusan Iman, Islam,

Ikhsan dan Sa'ah sebagaimana dalam salah satu riwayat dari Umar bin Khatab, (Al-Nawawi, t.t:7-8). Dari itu, penulis tidak ragu-ragu bahwa nilai-nilai religius (al-Qur'an) di dalam rumusan Iman, Islam, Ikhsan dan Sa'ah yang objektif menurut tradisi kerasulan Muhammad akan tetap dapat diandalkan sebagai prinsip-prinsip untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan dewasa ini.

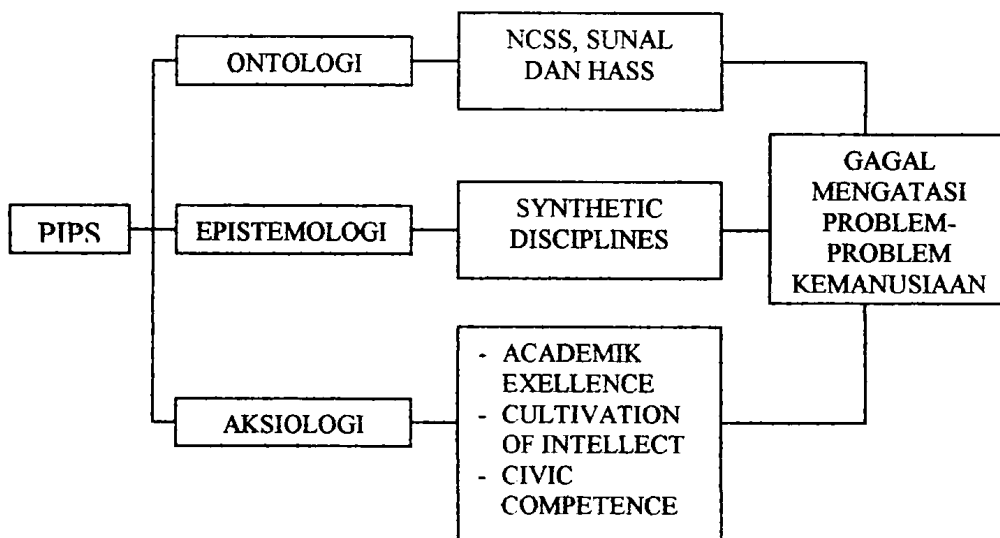
Maka dengan kemampuan yang amat terbatas, fokus perhatian penulis di dalam penelitian ini pada pokoknya diarahkan kepada usaha-usaha untuk mengungkap tradisi kerasulan Muhammad tentang bagaiman rumusan nilai-nilai keempat prinsip tersebut menjadi landasan serta filar bagi tegaknya bangunan kemanusiaan yang berperadaban. Dengan kata lain, di dalam tulisan ini akan mengungkap dan merekonstruksikan nilai-nilai religius (al-Qur'an) menurut pembuktian Rasulullah SAW ke dalam nilai-nilai kemanusiaan untuk ditawarkan sebagai landasan serta filar bagi konstruksi pendidikan IPS agar Pendidikan IPS kokoh dan dapat mencapai tujuannya.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Dalam usaha mengungkap rumusan nilai-nilai religius (al-Qur'an) ke dalam nilai-nilai kemanusiaan sebagai bahan analisis tentang seberapa jauh nilai-nilai kemanusiaan menurut rumusan nilai-nilai religius tersebut dapat menunjang konstruksi Pendidikan IPS (Social studies) sebagai "Pendidikan Ilmu Sosial" maupun sebagai "Pendidikan Sosial" yang mampu mengatasi problem-problem kemanusiaan, maka diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Belum ada credo dan indikasi keilmuan sebagai landasan filosofi Pendidikan IPS yang sah dan universal yang sesuai dengan tujuannya.
2. Terdapat kekeliruan menjadikan agama (*religion*) sebagai salah satu sumber di dalam social studies.
3. Apa dan bagaimana credo dan indikasi keilmuan sebagai landasan filosofi pendidikan IPS yang sah dan universal?
4. Bagaimana rumusan-rumusan nilai-nilai religius (al-Qur'an) menjadi nilai-nilai yang melandasi konstruksi kemanusiaan?
5. Bagaimana konstruksi Pendidikan IPS yang berlandaskan nilai-nilai tersebut?

Identifikasi dan rumusan masalah tersebut di atas, lebih jelasnya adalah untuk mencari jawaban atas masalah sebagaimana yang tertuang pada sketsa berikut:





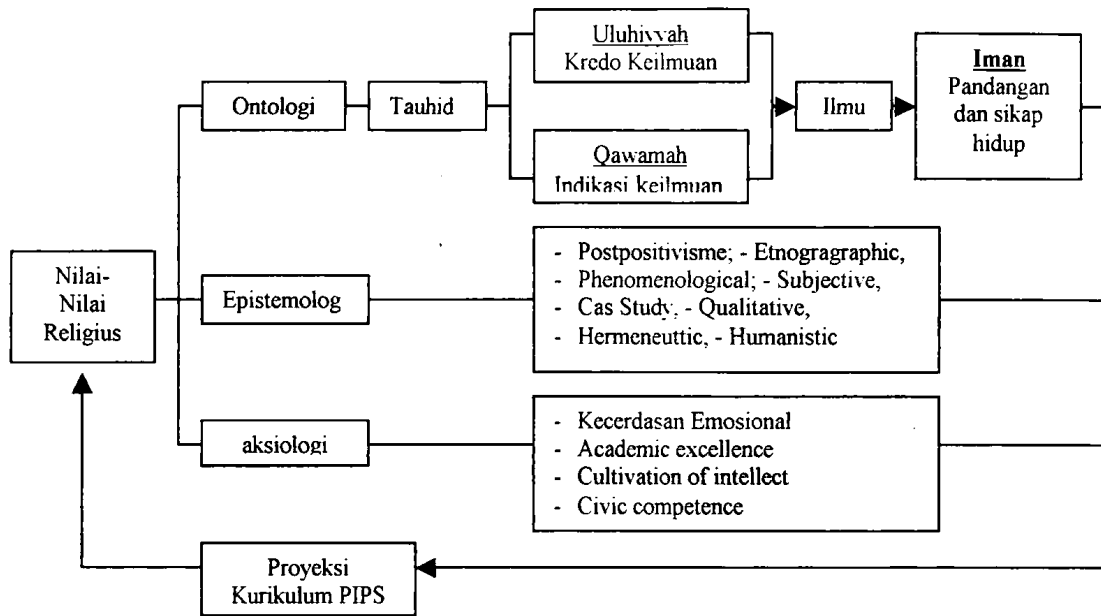
### C. Tujuan Penelitian

Secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi rumusan-rumusan tentang nilai-nilai religius (al-Qur'an) ke dalam nilai-nilai kemanusiaan di dalam Pendidikan IPS. Didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan tersebut, akan ditetapkan konstruksi pendidikan IPS, meliputi: (1) Kredo dan indikasi keilmuan sebagai Filosofi PIPS (2) Psikologi PIPS, (3) Antropologi PIPS, (3) Sosiologi PIPS (4) Sumber Materi PIPS, dan (5) Proyeksi PIPS.

Untuk itu diperlukan informasi tentang:

1. Rumusan-rumusan tentang nilai-nilai kemanusiaan di dalam al-Qur'an menurut para mufasir atau para ulama
2. Kredo dan indikasi keilmuan sebagai filosofi PIPS yang sah dan universal dalam al-Quran menurut para mufasir atau para ulama.
3. Konsepsi kedirian dan kekhalfahan manusia di dalam al-Qur'an menurut para mufasir atau para ulama.
4. Konsepsi kedirian dan kekhalfahan manusia menurut para ilmuwan sosial.
5. Hasil kajian terhadap kebutuhan dan perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi di masyarakat dan bangsa dari para ilmuwan khususnya dari para ilmuwan sosial.

Untuk memberi gambaran lebih jelas tentang tujuan penelitian ini, dapat diperhatikan pada gambar (sket) sebagai berikut:



**D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi dua macam signifikansi atau manfaat, yakni signifikansi sosial-kemanusiaan (*humanity*) dan signifikansi ilmiah. Signifikansi sosial dalam hal ini berarti bahwa dengan penelitian ini ingin dijelaskan bahwa masalah kredo keilmuan pendidikan IPS yang sah dan universal benar-benar masalah sosial-kemanusiaan. Yang berarti pula kredo keilmuan pendidikan IPS apabila tidak sah dan tidak universal, maka harus jelas pula implikasi negatif yang ditimbulkannya kepada Pendidikan IPS sebagai Pendidikan Ilmu Sosial maupun kepada pendidikan IPS sebagai Pendidikan Sosial termasuk implikasi negatifnya kepada sosial-kemanusiaan itu sendiri.

Selanjutnya yang dimaksud dengan signifikansi ilmiah adalah kegunaan hasil-hasil penelitian bagi perkembangan pengetahuan, khususnya mengenai

masalah social studies sebagai Pendidikan Ilmu Sosial dan sebagai Pendidikan Sosial dengan segala aspek-aspeknya di dalam social studies.

Mengenai signifikansi sosial-kemanusiaan yang diharapkan adalah bahwa dengan penelitian ini dapat disajikan bahan-bahan keterangan untuk menunjang kekokohan dan kebermutuan Pendidikan IPS secara sah dan universal, sebab bagaimana pun juga cara manusia membangun sosial-kemanusiaan banyak bergantung kepada ilmu ini. Adapun mengenai signifikansi ilmiah yang diharapkan dari penelitian ini adalah bahwa dengan penelitian ini diharapkan adanya informasi atau temuan mengenai fakta-fakta, prinsip-prinsip, konsep-konsep generalisasi-generalisasi dan teori-teori tentang Pendidikan IPS sebagai pendidikan ilmu sosial maupun sebagai pendidikan sosial atas universalitas konsep kemanusiaan dari nilai-nilai religius (al-Qur'an).

#### **E. Asumsi Penelitian**

Penelitian ini didasarkan kepada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Kemampuan social studies sebagai pendidikan ilmu sosial maupun sebagai pendidikan sosial ditentukan oleh kokoh tidaknya konstruksi pendidikan sosial itu sendiri, dan hal ini sangat bergantung kepada kredo Keilmuan yang sah dan universal.. Nilai-nilai religius di dalam al-Qur'an sangat dimungkinkan untuk direkonstruksi bagai konstruksi social studies, yang akan ditandai oleh integritas beberapa disiplin ilmu dan fungsinya sekaligus di dalam pendidikan IPS. Nilai-nilai religius itu, pada umumnya telah terintegrasikan dalam konsepsi nilai-nilai

kemanusiaan, yaitu nilai-nilai religius telah terbukti di dalam sejarahnya mampu mengatasi problem-problem kemanusiaan.

2. Dari nilai-nilai religius tersebut, penulis cenderung untuk merekonstruksi ke dalam nilai-nilai kemanusiaan di dalam pendidikan IPS. Rekonstruksi nilai-nilai kemanusiaan tersebut mencakup seperangkat yang integratif untuk mengkonstruksi pendidikan IPS, dengan pengertian nilai-nilai manakah yang menitik beratkan kepada akuntabilitas pendidikan IPS.
3. Seperangkat nilai-nilai yang integratif itu meliputi (i) Landasan ontologis ilmu, (2) Landasan epistemologi ilmu, dan (3) Landasan aksiologis ilmu.
4. Nilai-nilai kemanusiaan menurut rumusan-rumusan nilai-nilai religius (al-Qur'an) adalah benar-benar sah dan universal.
5. Nilai-nilai kemanusiaan menurut rumusan-rumusan nilai-nilai religius di dalam al-Qur'an dapat direkonstruksi ke dalam nilai-nilai kemanusiaan di dalam pendidikan IPS.

#### **F. Metoda Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*): Konsepsi-konsepsi, asas-asas, teori-teori, doktrin-doktrin pandangan-pandangan dan penemuan-penemuan tentang pendidikan IPS dicari dan ditelaah dari sumber referensi *primer*, yaitu dari ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadits, pendapat para ulama dari kitab-kitab klasik, buku-buku, buletin penelitian, journal penelitian, majalah penelitian periodik, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan lain-lain. Sedang sumber referensi sekunder tentang PIPS dicari dan ditelaah



terdiri dari buku-buku teks, monografi, review, dan lain-lain (Ronny Hanitijo Soemitro, t.t., : 39); dan sebagai sumber tersier digunakan buku-buku kamus, kamus istilah dan ensiklopedi untuk menjelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan permasalahan, dan selanjutnya memberi kajian secara *content analysis* dan dideskripsikan secara induktif dan secara logis, atau mengikuti urutan logika sesuai dengan yang dipesankan data.

Dalam rangka penelitian kepustakaan tersebut, karena menyangkut rumusan-rumusan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dari rumusan nilai-nilai religius sebagai fakta sejarah di dalam al-Qur'an yang ingin dijadikan sebagai landasan serta filar bagi konstruksi Pendidikan IPS, penulis sangat menyadari bahwa metodologi yang seyogyanya dipergunakan di dalam penelitiannya adalah metodologi yang beretika atau metodologi yang syarat dengan muatan-muatan nilai-nilai seperti "*postpositivistic, ethnographic, phenomenological, subjective, cas study, qualitative, hermeneutic, dan humanistic*" (Lincoln dan Guba, 1985:7). Namun, karena sejauh ini, penulis belum mampu menggunakan metodologi-metodologi tersebut, maka di dalam usaha-usaha mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bagaimana rumusan-rumusan nilai-nilai kemanusiaan dari rumusan-rumusan nilai-nilai religius (al-Qur'an) sebagai fakta sejarah yang dikaji di dalam tulisan ini, maka penulis hanya menggunakan metodologi "*hermeneutic*" menurut para tokohnya.

Inti metodologi hermeneutika tersebut, menurut Ankeremis (1987) dan Lioyd, adalah metodologi yang erat hubungannya dengan penafsiran teks-teks masa lalu dan penjelasan perbuatan pelaku sejarah. Penulis menjelaskan masa

lalu dengan mencoba menghayati atau menempatkan diri di dalam diri pelaku sejarah (empati), mencoba berpikir, merasakan, berbuat. Dalam mencoba memasuki diri pelaku sejarah dan mencoba memahami apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diperbuat oleh para pelaku sejarah itu. Dengan demikian, juga penulis akan menggunkan latar belakang kehidupan dengan seluruh pengalaman hidup sendiri, sehingga ada semacam 'dialog' di antara penulis dengan sumber-sumber sejarah yang digunakannya. Dalam hal ini, Sjamsuddin (t.t. 252) menjelaskan dua cara untuk menghadapi teks-teks sebagai sumber sejarah. Cara yang pertama adalah menafsirkan teks itu sendiri, kemudian menjelaskan pelaku sejarah dalam teks itu. Dalam teks itu dicoba dilihat keterpaduan (koherensi) antara masa lalu yang dikaji dengan bahan-bahan yang menjadi sumber sejarah sehingga dari penafsiran itu dapat diambil suatu sikap atau kesimpulan tertentu. Cara yang kedua adalah mencoba menjawab pertanyaan mengapa pelaku sejarah berbuat demikian rupa sebagaimana yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, proses hermeneutika yang menghayati dalam jalan pikiran orang lain, maksudnya tidak saja menafsirkan makna teks, tetapi juga untuk memahami mengapa seseorang berbuat seperti apa yang telah dilakukannya.

Fakta-fakta dasar yang disebut Carr (1985) terdiri dari dokumen, inkripsi, dan dari ilmu-ilmu bantu sejarah seperti arkeologi, epigrafi, humanistik, dan kronologi, diseleksi berdasarkan kepentingan guna mendapatkan deskripsi yang lengkap dan guna memberikan analisis atau penafsiran yang tepat dari objek yang diteliti (Sjamsuddin, t.t.: 7-8).

Dengan demikian, berarti teknis analisis data yang akan dipergunakan adalah metoda deskriptif analitis, dimana seluruh data atau keterangan akan diolah berdasar pada metoda kualitatif. Termasuk ke dalam metoda ini adalah metoda historis dan metoda komparatif yang keduanya dikombinasikan menjadi historis-komparatif. Metoda historis menggunakan – analisis atas peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum (Soerjono Soekanto, 1990:44).

Adapun teknik analisis data tersebut, dalam pelaksanaannya penulis mengikuti: *Pertama*, langkah-langkah analisis data yang dianjurkan Miles dan Huberman (1984), yaitu menempuh tiga langkah utama yang terdiri dari *reduksi data*, *display data atau sajian data*, dan *verifikasi dan/atau penyimpulan data* (Muhammad Ali, 1993:167); dan *Kedua*, melakukan proses analisis data menurut Harmersley dan Atkison, yang pokok-pokoknya adalah: (a) menguasai seluruh data; menyelidiki apakah ada hubungan antar data yang telah diperoleh dan membandingkan persamaan dan perbedaan seluruh data yang berasal dari berbagai sumber, (b) Menyelidiki berbagai konsep dan berbagai istilah yang timbul, (c) Menganalisis, merangkum dan mengambil kesimpulan.

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Kajian Pustaka tentang:
  - a Rumusan-rumusan tentang nilai-nilai kemanusiaan universal di dalam al-Qur'an menurut para mufasir atau para ulama.

- b Rumusan kredo Keilmuan yang sahih dan universal dalam al-Qur'an menurut para mufasir atau para ulama.
  - c Konsep kedirian dan kekhalifahan manusia dalam Al-Qur'an menurut para mufasir atau para ulama.
  - d Konsepsi kedirian dan kekhalifahan manusia menurut para ilmuwan sosial.
2. Menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan
  3. Melakukan analisis berdasarkan hasil kajian pustaka, dan merangkum untuk menarik kesimpulan.
  4. Pelaporan dan Pengujian